

Universitas
DAFTAR ISI
Esa Unggul

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5. Definisi Operasional.....	9
1.6. Teori dan Konsep	10
1.7. Metode Penelitian.....	11
1.7.1. Bahan Hukum Primer	12
1.7.2. Bahan Hukum Sekunder	12
1.8. Metode Analisis Bahan Hukum	12
1.9. Sistematika Penelitian	13

BAB II TINJAUAN UMUM KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN REKLAMASI.....	15
2.1. Ruang Lingkup Pertambangan Mineral dan Batubara	15
2.1.1. Pengertian Pertambangan.....	15
2.1.2. Sejarah Pertambangan Batubara Di Dunia	15
2.1.3. Sejarah Pertambangan Di Indonesia	17
2.1.4. Tahap-Tahap Pertambangan	18
2.2. Pertambangan Jenis Mineral dan Batubara	24
2.2.1. Definisi Mineral	24
2.2.2. Klasifikasi Mineral.....	24
2.2.3. Definisi Batubara	27
2.2.4. Klasifikasi Batubara.....	28
2.3. Kerusakan Lingkungan Akibat Tidak Dilaksanakannya Reklamasi Pascatambang	29
2.4. Ruang Lingkup Reklamasi dan Pascatambang	36
2.4.1. Definisi Reklamasi.....	36
2.4.2. Tujuan Reklamasi Lahan	37
2.4.3. Jenis-Jenis Reklamasi	38
BAB III HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA.....	40
3.1. Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia	40
3.2. Hukum Lingkungan Kepidanaan Sebagai Salah Satu Instrumen Perlindungan Hukum pada Lahan Bekas Tambang	41
3.3. Lahan Bekas Tambang Sebagai Objek Perlindungan Lingkungan Hidup ...	50

BAB IV ANALISA PERBANDINGAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA DAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	55
4.1. Sanksi Administratif Reklamasi dan Pascatambang	55
4.2. Peran Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Pada Pemberlakuan Sanksi Administratif	58
4.3. Sanksi Pidana Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup	62
4.4. Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan	66
4.5. Kewenangan Lembaga Pemberi Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana ..	67
4.5.1. Kewenangan Lembaga Pemberi Sanksi Administratif	67
4.5.2. Kewenangan Lembaga Pemberi Sanksi Pidana	68
BAB V PENUTUP.....	70
5.1. KESIMPULAN	70
5.2. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	